

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat diperoleh beberapa Kesimpulan dari penelitian Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Industri Pariwisata Di Yogyakarta (Studi Kasus: Objek Wisata Potorono Edupark Desa Salakan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Tingkat Akuntabilitas dalam Fase Pengembangan

Akuntabilitas keuangan di Potorono Edupark masih dalam tahap pengembangan, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Nur Basuki, Mas Habib, dan Bapak Sutardi. Pengelola mencatat transaksi harian secara manual dan menyusun laporan bulanan dalam Microsoft Excel, namun laporan ini bersifat sederhana, hanya mencakup pemasukan dan pengeluaran tanpa memenuhi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Ketiadaan format pelaporan resmi dan minimnya kompetensi SDM akuntansi menghambat kemampuan untuk menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara eksplisit. Pencatatan manual meningkatkan risiko kesalahan, seperti ketidaksesuaian data, yang mengurangi keandalan laporan. Meskipun demikian, komitmen pencatatan harian dan pelaporan bulanan mencerminkan upaya awal menuju akuntabilitas, sejalan dengan definisi akuntabilitas menurut Mardiasmo (2021) yang mencakup pertanggungjawaban, kepatuhan, transparansi, dan pengawasan.

2. Transparansi Internal yang Kuat, namun Terbatas secara Eksternal

Transparansi keuangan di Potorono Edupark sangat baik dalam lingkup internal. Informasi pemasukan dan pengeluaran bulanan disampaikan secara terbuka kepada ketua pengelola, pemerintah desa, dan masyarakat melalui musyawarah desa, pengumuman di kantor desa, serta laporan harian via grup WhatsApp, seperti diungkapkan oleh Bapak Nur Basuki, Mas Habib, dan Bapak Sutardi. Proses audit bersama bulanan juga dilakukan untuk memastikan keakuratan data, mendukung kebenaran dan keadilan dalam pengelolaan keuangan. Namun, transparansi eksternal terbatas karena tidak adanya publikasi

digital, seperti melalui situs web atau media sosial, yang membatasi akses informasi bagi wisatawan atau investor di luar komunitas desa. Ketiadaan laporan keuangan yang sesuai SAK ETAP juga mengurangi kejelasan dan kelengkapan informasi untuk keperluan formal.

3. Ketersediaan Dokumen yang Terbatas

Dokumen keuangan terdiri dari catatan harian manual dan laporan bulanan dalam Excel, disimpan dalam format soft file dan hard file, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Nur Basuki dan Mas Habib. Namun, dokumen ini tidak memenuhi SAK ETAP karena tidak mencakup elemen seperti neraca atau laporan arus kas, dan tidak didukung oleh buku panduan atau format pelaporan resmi. SOP keuangan tersedia, tetapi implementasinya lemah, seperti diungkapkan oleh Bapak Sutardi, akibat keterbatasan SDM dan pendampingan. Ketersediaan ringkasan pendapatan bulanan mendukung transparansi internal, tetapi kualitas dokumen yang sederhana menghambat akuntabilitas dan transparansi penuh.

4. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi yang Tidak Memadai

Informasi keuangan memiliki kejelasan yang cukup untuk keperluan internal, dengan laporan harian dan bulanan yang disampaikan secara terbuka. Namun, kelengkapan informasi sangat terbatas karena laporan hanya mencakup pemasukan dan pengeluaran tanpa elemen SAK ETAP. Pencatatan manual dan minimnya kompetensi SDM, sebagaimana diungkapkan oleh Mas Habib, menyebabkan risiko ketidakakuratan data dan kesulitan dalam menyusun laporan terstruktur, yang menghambat akuntabilitas dan transparansi untuk keperluan formal.

5. Keterbukaan Proses dan Kerangka Regulasi

Keterbukaan proses ditunjukkan oleh penyampaian laporan harian melalui grup WhatsApp dan pertemuan bulanan untuk membahas laporan keuangan, mendukung transparansi internal yang kuat. Namun, keterbukaan ini terbatas oleh laporan yang tidak terstandar dan risiko kesalahan dari pencatatan manual. SOP keuangan yang ada belum diterapkan secara optimal akibat minimnya pengetahuan SDM, seperti diungkapkan oleh Bapak Sutardi, sehingga kerangka regulasi belum efektif menjamin transparansi dan akuntabilitas.

6. Tantangan Utama

Tantangan utama dalam mencapai akuntabilitas dan transparansi meliputi: (1) laporan keuangan yang tidak sesuai SAK ETAP, (2) minimnya kompetensi SDM akuntansi, (3) kurangnya pelatihan dan pendampingan, (4) lemahnya implementasi SOP keuangan, dan (5) risiko kesalahan dari pencatatan manual. Partisipasi masyarakat yang pasif dan ketiadaan pengawasan formal oleh BPD juga memperlemah akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, berikut adalah rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di Objek Wisata Potorono Edupark:

1. Penerapan Format Pelaporan Berbasis SAK ETAP

Pengelola disarankan untuk mengadopsi format pelaporan keuangan sesuai SAK ETAP, yang dirancang untuk entitas kecil seperti destinasi wisata berbasis desa. Format ini akan memastikan laporan keuangan terstruktur, mencakup elemen seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, sehingga memenuhi standar akuntansi dan memudahkan verifikasi atau audit.

2. Pelatihan dan Bimbingan Akuntansi

Untuk mengatasi kurangnya kompetensi SDM, pengelola perlu menyelenggarakan pelatihan akuntansi dasar bagi staf keuangan dan pengelola. Bimbingan dari ahli akuntansi, seperti dari BUMDes, pemerintah kabupaten, atau institusi pendidikan, dapat membantu pengelola memahami dan menerapkan standar pelaporan keuangan yang sesuai.

3. Adopsi Perangkat Lunak Akuntansi

Pengelola disarankan untuk beralih dari pencatatan manual ke perangkat lunak akuntansi sederhana, seperti aplikasi berbasis cloud (misalnya, Wave atau Accurate Online versi dasar), untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan. Sistem digital juga mempermudah penyusunan laporan keuangan yang terstandar.

4. Penguatan Mekanisme Pengawasan Keuangan

Untuk meningkatkan akuntabilitas, pengelola perlu membentuk tim audit masyarakat atau melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara aktif dalam pengawasan keuangan. Mekanisme ini dapat memastikan dana dikelola sesuai tujuan dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

5. Peningkatan Transparansi Eksternal

Untuk memperluas transparansi kepada pihak eksternal, pengelola disarankan untuk mempublikasikan ringkasan laporan keuangan melalui platform digital, seperti situs web resmi Potorono Edupark atau akun media sosial. Langkah ini akan meningkatkan aksesibilitas informasi bagi wisatawan, calon investor, atau pihak lain, sekaligus memperkuat citra tata kelola yang baik.

6. Optimalisasi Penerapan SOP Keuangan

Pengelola perlu memperkuat penerapan SOP keuangan yang telah ada melalui pelatihan dan pengawasan rutin. Kerjasama dengan BUMDes atau pemerintah desa dapat memastikan SOP diterapkan secara konsisten untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi.